

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Demak pada tahun 2018-2020 didapatkan hasil bahwa masih terdapat banyak program dan pagu program dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Demak pada tahun 2018-2020 yang belum sesuai. Nilai indeks pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Demak pada tahun 2018 sebesar 10,615867 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 2,162499 dan pada tahun 2020 sebesar 7,0876485.
2. Hasil pengukuran dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak dari 4 indikator yang diukur pada tahun 2018 terdapat 3 indikator yang sesuai, sedangkan pada tahun 2019 4 indikator sudah sesuai dan pada tahun 2020 hanya 3 indikator yang sesuai dengan aturan *mandatory spending* dan standar pelayanan minimal. Nilai indeks pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak pada tahun 2018 sebesar 15, pada tahun 2019 sebesar 20 dan pada tahun 2020 sebesar 15.
3. Hasil pengukuran dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah yang diukur berdasarkan indikator keteraksesan dari 29 dokumen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat 24 dokumen yang dapat diakses dan diunduh secara umum, pada tahun 2019 terdapat 23 dokumen yang dapat diakses dan diunduh secara umum dan pada tahun 2020 terdapat 24 dokumen yang dapat diakses dan diunduh secara umum. Nilai indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Demak pada tahun 2018 sebesar 12,413793; nilai indeks pada tahun 2019 sebesar 11,896552 dan pada tahun 2020 sebesar 12,413793.
4. Hasil pengukuran dimensi penyerapan anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak yang diukur dengan 9 indikator pada tahun 2018 terdapat 2 penyerapan anggaran yang belum memenuhi standar penyerapan minimal 80% atau $\geq 80\%$ yaitu penyerapan anggaran belanja subsidi dan penyerapan anggaran

belanja tidak terduga. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing terdapat 3 penyerapan anggaran yang belum memenuhi standar yaitu penyerapan anggaran belanja bunga, penyerapan anggaran belanja subsidi dan penyerapan anggaran belanja tidak terduga. Nilai indeks dimensi penyerapan anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak pada tahun 2018 sebesar 15,5556 sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 13,3333.

5. Hasil pengukuran dimensi kondisi keuangan daerah Kabupaten Demak yang diukur berdasarkan 6 indikator berupa rasio kondisi keuangan didapatkan hasil bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 kondisi keuangan Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan. Nilai indeks dimensi kondisi keuangan daerah Kabupaten Demak pada tahun 2018 sebesar 5,75225 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4,67775 dan pada tahun 2020 sebesar 7,00875.
6. Hasil pengukuran dimensi opini BPK atas LKPD yang diukur berdasarkan predikat dari LKPD yang diperoleh oleh Kabupaten Demak dari BPK dalam 3 tahun berturut-turut sehingga didapatkan hasil selama tahun 2016-2020 Kabupaten Demak mempertahankan predikat WTP. Nilai indeks dimensi opini BPK atas LKPD Kabupaten Demak pada tahun 2018-2020 masing-masing sebesar 15.

Berdasarkan nilai indeks dimensi yang diperoleh dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada Kabupaten Demak, maka nilai akhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Demak tahun 2018 yaitu 74,33751; nilai akhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Demak tahun 2019 sebesar 67,070101 dan nilai akhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Demak tahun 2020 adalah 69,3262505.

Nilai akhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Demak tahun 2018 sebesar 74,33751 termasuk dalam kategori baik karena nilainya lebih besar dari nilai $Mean + (1 \times STDEV)$ atau lebih besar dari 73,90639407. nilai akhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Demak tahun 2019 sebesar 67,587342 dan nilai akhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Demak tahun 2020 sebesar 69,8434915 termasuk dalam kategori perlu perbaikan karena nilai IPKD tersebut berada diantara nilai $Mean - (1 \times STDEV)$ dan $Mean + (1 \times STDEV)$ atau diantara 66,6069813 dan 73,90639407.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan pada penelitian ini diantaranya :

1. Dokumen KUA-PPAS Kabupaten Demak tahun 2019 tidak menyajikan informasi terkait program dan pagu program prioritas pembangunan Kabupaten Demak tahun 2019, sehingga tidak dapat dibandingkan baik program maupun pagu programnya dengan dokumen lain.
2. *Website* resmi Pemerintah Kabupaten Demak tidak menyajikan informasi terkait waktu pengunggahan dokumen pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam pengukuran dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat diukur dengan indikator ketepatan waktu.
3. Pelaksanaan penelitian yang sangat singkat menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya hasil penelitian ini, sehingga diperlukan perencanaan penelitian yang matang agar hasilnya lebih maksimal.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini. diantaranya yaitu :

1. Penyusunan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Demak pada tahun 2019 sebaiknya disesuaikan dengan format dokumen KUA-PPAS yang ideal, sehingga informasi program dan pagu program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2019 disajikan dengan lengkap dan jelas.
2. Dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak yang masih belum tersedia harus dilengkapi ketersediaan file dokumennya dan waktu pengunggahan dokumen dalam *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat daerah.
3. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan derajat kesesuaiannya baik antar program maupun pagu programnya agar antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah menciptakan keselarasan yang tinggi agar target dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Demak tercapai sesuai rencana.
4. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan melakukan pengukuran terhadap semua indikator penelitian yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti indikator ketepatan waktu pada dimensi transparansi

pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih maksimal.

